



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

SUB UNIT KERJA : PIMPINAN UNIVERSITAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAMBANG AGUS KIRONOTO

2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN ASET

3. NHK : **632205** 

### II. DATA HARTA

#### A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 8.203.500.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/350 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.950.000.000
- 2. Tanah Seluas 486 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 972.000.000
- 3. Tanah Seluas 387 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp.

1.161.000.000

4. Tanah Seluas 292 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp.

730,000,000

5. Tanah Seluas 479 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp.

1.676.500.000

6. Tanah Seluas 204 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp.

714.000.000

## B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

667.000.000

- MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS 1.8 V A/T Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
- MOBIL, NISSAN MARCH 1.2 4X2 AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
- 3. MOBIL, HONDA HR-V RU1 1.5 E Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
- 4. MOBIL, TOYOTA SIENTA 1.5V CVT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
- 5. MOTOR, HONDA NF 100 D Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.





2.000.000

MOTOR, HONDA NC11C1C A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

5.000.000	al al al	at at
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	160.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	
E. KAS DAN SETARA KAS	PRP.	866.621.805
F. HARTA LAINNYA	Rp.	
Sub Total	Rp.	9.897.121.805
III. HUTANG	Rp.	187.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.709.621.805

#### Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
- 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 22 Agustus 2019.
- 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

